

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak adanya pandemi virus covid-19 ini dapat menyebabkan banyak sektor ekonomi yang mengalami kemerosotan, serta mengalami penurunan yang cukup besar pada anggaran negara. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan berbagai dampak, salah satunya adalah himbauan untuk jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, bekerja dan belajar dari rumah, serta membatasi mobilitas (Bakri, 2020). Pada tahun 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa pada pendapatan negara mengalami penurunan hingga mencapai 10%. Penurunan pendapatan ini dapat menyebabkan suatu proses produksi menjadi terhambat. Salah satu yang terdampak dari adanya wabah covid-19 ini adalah pendapatan negara yang berasal dari pajak (Siregar, 2021).

Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh masyarakat kepada pemerintah yang sifatnya memaksa. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak terbukti memegang jajaran peran utama dalam pembangunan nasional yang berhilir pada kesejahteraan rakyat karena menduduki 70% hingga 80% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Untuk itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi pekerjaan rumah yang vital bagi Direktorat Jenderal Pajak (Pratiwi, 2021). Pajak daerah terdiri dari dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Salah satu perolehan pajak provinsi dan pajak kabupaten yaitu berasal dari wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki kontribusi yang sangat besar pada penerimaan pajaknya sehinggasangat penting untuk dioptimalkan dengan cara meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula penerimaan pendapatan pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Kepatuhan dalam diri wajib pajak menjadi faktor utama dalam memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor terkhusus di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut berhubungan dengan tanggung jawab masyarakat Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari negara yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak.

Dari berbagai macam permasalahan yang terjadi, salah satunya di wilayah Kabupaten Sumenep seperti masalah dalam perpajakan yang terletak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab atas kewajiban pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku, dimana masih banyak masyarakat yang kurang patuh dalam membayar pajak seperti menunggak dalam pembayaran pajak, bahkan ada yang memang kurang peduli terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan apalagidengan adanya fenomena pandemi covid-19 ini sangat berdampak

terhadap penghasilan seseorang yang mana pada pendapatan seseorang mengalami penurunan, sehingga juga berdampak pada pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu target penerimaan pajak yang akan diperkirakan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep akan mengalami perubahan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Pendapatan Daerah UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19?
3. Bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target perpajakan kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target perpajakan kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang di dapat secara langsung saat melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Wajib Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berkenaan dengan perpajakan, serta memahami akan pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Fokus penelitian

Dalam penelitian ini fokus penelitian yang akan diteliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Pendapatan Daerah UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep.

